



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA WATES

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NURLISTIYANI**  
2. Jabatan : **PANITERA MUDA PERKARA HUKUM**  
3. NHK : **418602**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 489 m2/170 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 115 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 672 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 111.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA 125 /SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 19.000.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 63.687.287

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 469.187.287

**III. HUTANG** Rp. 130.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 339.187.287

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.